

**PERFORMANCE ANALYSIS OF THE NATIONAL COMMUNITY EMPOWERMENT  
PROGRAM (PNPM) INDEPENDENT RURAL  
(STUDY ON WOMEN'S SAVINGS AND LOANS IN THE DISTRICT CERME, GRESIK  
REGENCY)**

Tatik Pujiati

Tauran

**ABSTRACT**

In 2012 the number of poor people in Indonesia reached 29.132.400 people and East Java province was ranked first by the number of poor people in the city amounted to 1.630.600 souls, while lives in the village of 3.440.300 souls. One of the government's policy to reduce the number of poor people through the National Program for Community Empowerment (PNPM) Independent in Rural Areas. In the implementation, there are cases of failure and success of program management. The case of implementation failure occurred in several districts at Southeast Sulawesi. Meanwhile, one of the successful implementation occurred in the Cerme District Gresik Regency with the achievement of SPP's management of activities performance by obtained the activity services in the amount of Rp 206.428.833; or 11.22% of the capital. The Phenomenon in the implementation of activities PNPM Rural bring to the importance of a performance analysis on the PNPM's management of activities especially related funding such as SPP's activities.

This research aimed to describe the performance analysis of PNPM Rural especially on SPP's activity at Cerme District, Gresik regency. The method used in this research is descriptive qualitative approach. Data collection techniques in this research conducted with interviews, documentation and observation. Techniques of data analysis in qualitative analysis through the stages of reduction, data display and conclusion. It also made the calculation in the assessment of value for money to obtain the measure the economy, efficiency and effectiveness of the SPP's performance activities in Cerme District.

The results of this research indicate that the performance management of SPP activity in the Cerme District, Gresik Regency is very economical, very efficient and also very effective. Economically obtained by the ratio of the economic and the valuation of input performance indicators. Efficiencies in addition to obtained from the efficiency ratio is also supported by labor efficiency, the use of work equipment and the use of surplus to the capital increase. In order to obtain the effectiveness used of some assessment, such as: effectiveness ratio, regulation and discipline during the activity of users in the installment refund. This SPP's management of activities performance in the Cerme, District Gresik Regency can be maintained and continued to be held each year.

Keywords: Performance analysis, performance indicators, value for money.

**ANALISIS KINERJA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)  
MANDIRI PERDESAAN  
(STUDI PADA KEGIATAN SIMPAN PINJAM PEREMPUAN DI KECAMATAN CERME  
KABUPATEN GRESIK)**

Tatik Pujiati

Tauran

**ABSTRAK**

Tahun 2012 angka penduduk miskin di Indonesia mencapai 29.132.400 orang dan Provinsi Jawa Timur berada di peringkat pertama dengan angka penduduk miskin di kota sebesar 1.630.600 jiwa dan di desa 3.440.300 jiwa. Salah satu kebijakan pemerintah untuk menekan angka penduduk miskin melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Pada implementasinya, terjadi kasus kegagalan dan keberhasilan dalam pengelolaan program tersebut. Kasus kegagalan implementasi terjadi pada beberapa kabupaten di Sulawesi Tenggara. Sedangkan keberhasilan implementasi salah satunya terjadi di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dengan pencapaian kinerja pengelolaan kegiatan SPP dengan memperoleh jasa kegiatan sebesar Rp 206.428.833; atau 11,22% dari modal. Fenomena dalam implementasi kegiatan pada PNPM Mandiri Perdesaan tersebut menyadarkan pentingnya sebuah analisis kinerja pada pengelolaan kegiatan dalam PNPM Mandiri Perdesaan khususnya terkait dana seperti kegiatan SPP.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan analisis kinerja PNPM Mandiri Perdesaan khususnya pada kegiatan SPP di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Selain itu juga dilakukan perhitungan dalam penilaian *value for money* untuk memperoleh ukuran ekonomi, efisiensi dan efektivitas dari kinerja kegiatan SPP di Kecamatan Cerme.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan kegiatan SPP di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik adalah sangat ekonomis, sangat efisien dan juga sangat efektif. Ekonomis diperoleh berdasarkan rasio ekonomi dan penilaian indikator kinerja *input*. Efisiensi selain diperoleh melalui rasio efisiensi juga didukung oleh efisiensi tenaga kerja, penggunaan alat kerja dan pemanfaatan *surplus* untuk penambahan modal. Untuk efektivitas diperoleh dari beberapa penilaian yaitu: rasio efektivitas, adanya peraturan selama kegiatan berlangsung dan kedisiplinan pemanfaat dalam angsuran pengembalian dana. Diharapkan kinerja pengelolaan kegiatan SPP di Kecamatan Cerme kabupaten Gresik dapat dipertahankan dan kegiatan dapat terus dilaksanakan setiap tahunnya.

Kata Kunci: Analisis Kinerja, indikator kinerja, *value for money*.

## I. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan klasik yang harus dihadapi Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2012 mencapai 29.132.400 orang (<http://bps.go.id>, 16 Januari 2013). Data BPS tersebut juga menunjukkan bahwa Jawa Timur merupakan provinsi yang menduduki urutan pertama angka penduduk miskin terbesar di Indonesia. Di tahun 2012, angka penduduk miskin di Jawa Timur mencapai 5.071.000 jiwa atau sebesar 13,40 persen dari seluruh angka penduduk miskin di Indonesia. Komposisi angka tersebut terdiri dari angka penduduk miskin di kota sebesar 1.630.600 jiwa dan di desa 3.440.300 jiwa (<http://jatim.bps.go.id>, 16 Januari 2013). Angka penduduk miskin tersebutlah yang dijadikan acuan pemerintah untuk terus membuat strategi dan kebijakan dalam menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia, salah satunya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

Adanya PNPM Mandiri Perdesaan dan program kemiskinan lainnya salah satu penyebab penurunan angka penduduk miskin di provinsi Jawa Timur lebih cepat dialami daerah perdesaan daripada perkotaan. Hal tersebut ditunjukkan oleh Data BPS Jawa Timur mengenai Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut daerah pada Maret 2008 s/d Maret 2012.

PNPM Mandiri Perdesaan merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat dalam upaya mempercepat penanggulangan

kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. PNPM terdiri dari empat komponen program yaitu: Pendampingan Masyarakat dan Pemerintahan Lokal; Bantuan Langsung Masyarakat (BLM); Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal; Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program.

Program Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) merupakan dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai tiga kegiatan yaitu pembangunan sarana fisik desa, peningkatan kapasitas kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Untuk melihat efektivitas dan pencapaian pelaksanaan kegiatan diperlukan kajian-kajian untuk melihat kinerja dari sebuah kegiatan maupun program sehingga kajian tersebut dapat memberi gambaran mengenai penilaian kinerja yang telah berhasil dicapai (Mahsun, 2006:27). Namun demikian, tidak semua kinerja kegiatan program BLM PNPM Mandiri Perdesaan berjalan efektif. Terdapat penyimpangan dan penyalahgunaan dalam pengelolaan dana BLM seperti kasus penyalahgunaan BLM di Provinsi Sulawesi Tenggara dan di Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan terkait macetnya pengembalian dana pinjaman kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Fenomena kinerja pengelolaan BLM tidak hanya mengenai penyalahgunaan, tetapi juga terdapat keberhasilan dalam mengelola dana BLM. Salah satunya UPK Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik yang berhasil mencapai *surplus* mengelola dana BLM pada kegiatan Simpan Pinjam

Perempuan (SPP) sebesar Rp 206.428.833.

Paparan kasus mengenai kegagalan dan keberhasilan pengelolaan dana kegiatan pada program BLM PNPM Mandiri Perdesaan tersebut menyadarkan pentingnya sebuah analisis kinerja pengelolaan kegiatan yang dibiayai BLM, khususnya kegiatan yang mengelola dana bergulir seperti kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Analisis kinerja pengelolaan kegiatan SPP dilakukan di Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik karena pada UPK tersebut telah berhasil mengelola kegiatan SPP sehingga analisis yang dilakukan dapat menghasilkan informasi mengenai kinerja dari proses pengelolaan kegiatan serta untuk melihat manfaat atau hasil dari keberhasilan pengelolaan kegiatan tersebut.

Analisis kinerja pada kegiatan SPP dilakukan melalui *value for money* dimana kegiatan akan dinilai dari tiga elemen pokok, yaitu: ekonomi, efisiensi dan efektivitas yang di dalamnya juga terkandung indikator kinerja *input*, proses, *output* dan *outcome* (Mahmudi, 2005:89).

Sehubungan dengan hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Analisis Kinerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (Studi pada Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)."

#### **Rumusan Masalah**

"Bagaimana analisis kinerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan pada kegiatan Simpan Pinjam

Perempuan (SPP) di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik?"

#### **Tujuan Penelitian**

Untuk mendeskripsikan analisis kinerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan pada kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

#### **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai guna dalam kajian teori ilmu administrasi negara khususnya tentang analisis kinerja pada program maupun kegiatan dalam sektor publik. Manfaat praktis pada penelitian ini agar penelitian dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang analisis kinerja pengelolaan kegiatan atau program pada sektor publik; bagi pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi kinerja terkait topik penelitian dan sebagai bahan referensi untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan SPP. Bagi Universitas Negeri Surabaya, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi kepustakaan bagi mahasiswa yang mengkaji tentang analisis sebuah kebijakan.

## **II. Kajian Pustaka**

### **Analisis Kinerja**

Setiap organisasi dalam mengelola kegiatan memiliki target dan tujuan masing-masing untuk menilai capaian kegiatan yang dihasilkan atau yang disebut dengan analisis kinerja. Begitu pula pada organisasi sektor publik juga memerlukan analisis terhadap kinerjanya untuk akuntabilitas publik (Mahmudi, 2005:7).

Moehariono (2009:60) mengartikan kinerja (*performance*)

sebagai sebuah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan sebuah program, kegiatan maupun kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan dalam perencanaan strategi organisasi. Otley (dalam Mahmudi, 2005:6) bahwa “kinerja mengacu pada sesuatu yang terkait dengan kegiatan melakukan pekerjaan, dalam hal ini meliputi hasil yang akan dicapai kerja tersebut.”

Analisis Kinerja dilakukan berdasarkan penilaian kinerja melalui indikator kinerja dan ukuran kinerja. Larry D Stout (dalam Bastian 2006:54) menyatakan, “penilaian kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (*mission accomplishment*) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa ataupun suatu proses.” Penilaian kinerja melalui indikator kinerja dan ukuran kinerja dilakukan dengan cara yang berbeda meskipun seringkali keduanya dianggap sama.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (dalam Mahsun, 2006:71) mendefinisikan indikator kinerja sebagai ukuran kualitatif yang mendeskripsikan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. I Gusti Agung Rai (2008:21) menyebutkan aspek penilaian kinerja organisasi sektor publik melalui empat indikator, yaitu: *input*, *proses*, *output*, dan *outcome*.

Disamping melalui indikator kinerja, analisis kinerja juga diperoleh dari penilaian atas ukuran kinerja yang dicapai. Mahsun (2006:131-132) menyebutkan empat pendekatan sebagai dasar kegiatan dalam mengukur kinerja pada organisasi sektor publik, yaitu: analisis anggaran,

analisis rasio laporan keuangan, *Balanced scorecard* (BSC) serta *value for money*. Pengukuran pada penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *value for money* karena di dalamnya juga mencakup indikator kinerja dalam langkah-langkah penilaian kinerja.

Setelah melakukan penilaian kinerja, pada tahap akhir dilakukan analisis kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja. Moehersono (2009:96) menjelaskan analisis kinerja adalah kegiatan menginterpretasikan atau menggunakan data dan informasi yang terkumpul untuk membuat sebuah kesimpulan mengenai kinerja atau pencapaian yang diperoleh atas kerja yang dilakukan melalui berbagai metode.

#### **Analisis Kinerja melalui *Value for Money***

Mahmudi (2005:89) menyatakan “*value for money* adalah penghargaan terhadap nilai uang”. Sedangkan menurut Mardiasmo (2002:127) “*value for money* merupakan inti penilaian kinerja keuangan pada instansi pemerintahan. Kinerja keuangan instansi pemerintah harus dinilai dari sisi *input*, *output* dan *outcome* secara bersama-sama”. Dua pernyataan diatas diartikan bahwa setiap organisasi memperoleh anggaran pendanaan untuk pengelolaan kegiatan dan harus memiliki transparansi dalam penggunaannya mulai dari penganggaran dana, proses pelaksanaan kegiatan, *output* dari proses kegiatan hingga hasil yang diperoleh dari pengelolaan kegiatan tersebut.

Mardiasmo (2002:4) mengatakan “indikator *value for money* menekankan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan

efektivitas atau lebih dikenal 3E". I Gusti Agung Rai (2008:22) secara jelas mengatakan bahwa pada intinya konsep *input*, proses, *output* dan *outcome* berkaitan erat dengan aspek kinerja yang terdiri atas *economy*, *efficiency* dan *effectiveness* dalam *value for money*. Penjelasan dari pernyataan tersebut adalah ekonomi berkaitan dengan pengadaan *input* yaitu terjadinya konversi alokasi dana untuk memperoleh *input* primer dan *input* sekunder. Efisiensi berkaitan dengan proses *input* menjadi *output* yaitu terkait biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan atau hasil dalam pelaksanaan sebuah kegiatan. Efektivitas berkaitan dengan pencapaian dari pelaksanaan sebuah kegiatan terhadap rencana yang telah dibuat, serta dampak *output* dan *outcome* kegiatan yang dihasilkan. Selanjutnya akan dijabarkan mengenai ketiga elemen pokok *value for money* seperti di bawah ini:

### 1. Ekonomi

Mahmudi (2005:89) berpendapat bahwa elemen ekonomi terkait dengan penggunaan biaya atau anggaran untuk mengkonversikan *input* menjadi *input* primer dan *input* sekunder. *Input* berupa sumber daya keuangan atau dana dalam sebuah pengelolaan kegiatan. *Input* kemudian dikonversikan menjadi *input* primer berupa pendanaan yang digunakan untuk modal utama sebuah kegiatan dan *input* sekunder berupa dana untuk operasional kegiatan, tenaga kerja, bahan, peralatan dan infrastruktur.

Bastian (2001:336) mengatakan ekonomi merupakan hubungan antara *input* dan pasar, dimana pembelian barang dan jasa diperoleh dengan harga terbaik (*spending less*). Dalam

analisisnya, selain dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan juga dapat dilakukan melalui perhitungan rasio ekonomi, yaitu dengan membandingkan *input* dengan harga yang dikeluarkan untuk memperoleh *input* baik primer maupun sekunder.

Ukuran ekonomi berupa jumlah anggaran yang dialokasikan serta penggunaannya dalam pengelolaan kegiatan atau program. Untuk mempermudah penilaian kinerja dalam elemen ekonomi, dapat digunakan rasio ekonomi dengan formulasi menurut Mahmudi (2005:90) seperti di bawah ini:

$$\text{rasio ekonomi} = \frac{\text{input}}{\text{harga input}} \times 100\%$$

Pada penelitian ini, *input* yang dimaksud adalah alokasi dana yang digunakan untuk mengkonversi nilai uang menjadi *input* primer maupun *input* sekunder. Harga *input* pada rasio ekonomi ini adalah nominal yang dikeluarkan untuk memperoleh *input*, baik *input* primer maupun *input* sekunder.

### 2. Efisiensi

Pada elemen efisiensi lebih menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya (*input*) dengan keluaran (*output*) yang dihasilkan sehingga terkait pula pada proses kinerja dalam sebuah program maupun kegiatan (Mahmudi, 2005:91).

Mahmudi (2005:91) menambahkan bahwa efisiensi akan diperoleh suatu organisasi, program maupun kegiatan apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah mungkin atau sebaliknya yaitu dengan *input* tertentu dapat menghasilkan *output* sebesar mungkin (*spending well*). Berdasarkan

konsep-konsep di atas, dapat disimpulkan bahwa aspek efisiensi bisa dilihat dari penggunaan sumber daya seminimal mungkin untuk memperoleh hasil semaksimal mungkin.

Penilaian kinerja dari elemen efisiensi dapat dilihat dilakukan pada tiga indikator yang disebutkan oleh I Gusti Agung Rai (2008:22) yaitu *input*, *output*, dan standar efisiensi. Ketiga indikator tersebutlah yang akan membentuk penilaian kinerja apakah suatu pekerjaan dapat dikatakan efisien atau sebaliknya. Indikator *input* menunjukkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang menunjang keberlangsungan kegiatan, seperti: sumber daya manusia (SDM) atau tenaga kerja, barang modal dan keperluan penunjang lainnya. Sedangkan indikator *output* menunjukkan bahwa efisiensi tercapai apabila ketersediaan *input* yang tersedia dapat menghasilkan *output* yang lebih besar dari *output* nya. Pada kegiatan SPP, penilaian *output* dapat dilihat dari besaran dana untuk membiayai jumlah kelompok pemanfaat. Selanjutnya, standar efisiensi yang digunakan adalah salah satu standar yang ditawarkan oleh I Gusti Agung Rai (2008:23) yaitu pemanfaatan utilitas yang meliputi: efisiensi karyawan, peralatan, fasilitas dan lainnya.

Ukuran efisiensi diperoleh dari perbandingan pengeluaran biaya dan pendapatan dari pengelolaan kegiatan yang kemudian dirasioakan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dari formulasi rasio efisiensi menurut Mahsun (2006:187) di bawah ini:

$$\text{rasio efisiensi} = \frac{\text{pengeluaran biaya}}{\text{pendapatan}} \times 100\%$$

Pada penelitian ini pengeluaran biaya adalah akumulasi dari total seluruh biaya operasional maupun non operasional selama kegiatan berlangsung. Pendapatan yang dimaksud adalah perolehan total dari pendapatan kegiatan yang dihasilkan. Pada kegiatan SPP, pendapatan total terdiri dari pendapatan jasa pengembalian SPP, pendapatan operasional lain-lain, bunga bank operasional UPK dan bunga bank perguliran SPP serta pendapatan non operasional lain-lain.

### 3. Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Efektifitas menggambarkan kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yaitu dengan membandingkan *output* dan *outcome* dari pengelolaan sebuah kegiatan (Mahmudi, 2005:92). Sedangkan I Gusti Agung Rai (2008:23) mengartikan efektivitas adalah sesuatu yang mengacu pada hubungan antara *output* dengan tujuan yang ditetapkan atau dapat dikatakan efektivitas merupakan hubungan antara *outcome* dan *output*.

Penilaian kinerja berdasarkan efektivitas dengan menilai *outcome* dapat didasarkan pada dua kategori seperti yang diungkapkan Norman Flynn (dalam I Gusti Agung Rai, 2008:23) yaitu perubahan kondisi (*change in state*) dan perubahan perilaku (*change in behaviour*). Pada kegiatan SPP, perubahan kondisi dilihat dari perbaikan usaha masyarakat miskin produktif menjadi lebih berkembang. Sedangkan perubahan perilaku sendiri lebih pada pembentukan disiplin masyarakat dalam kegiatan SPP.

Mahmudi (2005:92) mengatakan bahwa suatu organisasi, program maupun kegiatan dapat dikatakan

efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan (*spending wisely*). Hal ini berarti efektivitas dapat dilihat dari pencapaian kegiatan SPP berdasarkan target yang ditentukan sebelumnya. Selain itu, efektivitas juga dapat dilihat dari tingkat pengembalian pinjaman SPP yang didukung oleh faktor-faktor keberhasilan dalam pengelolaan SPP.

Mahsun (2006:187) berpendapat bahwa untuk mengukur tingkat efektivitas diperlukan data-data realisasi pendapatan dan target pendapatan pada sebuah pelaksanaan kegiatan maupun program. Merujuk dari pernyataan tersebutlah, Mahsun (2006:187) membuat formulasi untuk menilai efektivitas seperti berikut:

$$\text{rasio efektivitas} = \frac{\text{realisasi pendapatan}}{\text{rencana pendapatan}} \times 100\%$$

Pada penelitian ini, pendapatan dari kegiatan SPP yang dimaksud adalah hasil dari jasa pengembalian pinjaman dana SPP. Hal tersebut dikarenakan modal pokok atau *input* primer yang dikelola pada kegiatan SPP nantinya akan menjadi asset produktif kegiatan SPP di periode selanjutnya, sedangkan hanya pengembalian jasa yang dapat dipergunakan sebagai alokasi dana *surplus* pada beberapa pemanfaatan seperti pemupukan modal, penggunaan kelembagaan, untuk bonus pengurus dan dana sosial untuk Rumah Tangga Miskin (RTM).

### III. Metodologi Penelitian

#### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif (*descriptive research*) karena penelitian dilakukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada di lapangan yaitu berupa kinerja pengelolaan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan

Cerme Kabupaten Gresik dalam komponen program Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan.

Pada dasarnya penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif meskipun di dalamnya juga terdapat perhitungan untuk melakukan penilaian melalui *value for money*. Pernyataan tersebut didukung oleh Zuriah (2005:98) yang mengatakan bahwa di dalam penelitian sosial juga ditemukan pemaparan data kualitatif yang menggunakan hasil perhitungan statistik deskriptif dan temuan kualitatif dan kuantitatif disajikan bersama-sama.

#### Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Lokasi tersebut digunakan dalam penelitian ini karena UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Cerme merupakan lembaga yang menangani pengelolaan dan operasional pelaksanaan kegiatan antar desa. Pemilihan lokasi pada UPK Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dikarenakan UPK tersebut telah berhasil mengelola kegiatan SPP. Selain itu, ketertarikan penelitian di Kecamatan Cerme karena PNPM Mandiri Perdesaan baru dilaksanakan tahun 2009 dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Gresik

#### Fokus Penelitian

Pada penelitian ini berfokus pada kinerja pengelolaan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik berdasarkan elemen pokok *economy*, *efficiency* dan *effectiveness* (3E) dalam *value for money* yang di dalamnya meliputi



indikator kinerja: *input*, proses, *output* dan *outcome*. Secara rinci analisis 3E dalam *value for money* adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi, mengenai konversi *input* menjadi *input* primer (modal utama dalam kegiatan) dan *input* sekunder (tenaga kerja, bahan kerja, serta perlengkapan pendukung untuk operasional) yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan SPP di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.
2. Efisiensi, mengenai proses *input* menjadi *output*, dimana efisiensi dilihat dari besaran total biaya pengeluaran baik operasional maupun non operasional untuk memperoleh total pendapatan dari pelaksanaan kegiatan SPP Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Selain itu efisiensi dapat dinilai berdasarkan standar efisiensi, dalam hal ini standar efisiensi yang digunakan adalah efisiensi pemanfaatan utilitas, yaitu mencakup tenaga kerja, peralatan dan fasilitas lainnya.
3. Efektivitas, terkait *output* dan *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan SPP atau dapat diartikan efektivitas sebagai wujud pencapaian hasil terhadap tujuan yang telah ditetapkan pada program PNPM Mandiri Perdesaan. Dalam penelitian ini, efektivitas lebih ditekankan pada perbandingan antara realisasi pendapatan dari jasa pengembalian dengan rencana pendapatan kegiatan di periode sebelumnya sehingga dapat menunjukkan pencapaian hasil kegiatan kegiatan SPP di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

## **Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Jenis data dibedakan berdasarkan bentuk data yang digunakan dalam

penelitian. Berikut adalah jenis data yang digunakan:

- a. Data Kualitatif. Data ini terdiri dari deskripsi kata-kata, skema dan gambar (Sugiyono, 2006:14). Data kualitatif pada penelitian ini adalah data dari penilaian indikator kinerja (*input*, proses, *output* dan *outcome*) yang diperoleh melalui wawancara.
- b. Data Kuantitatif. Data ini berupa angka-angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2006:14). Data ini diperoleh dari dokumentasi yaitu laporan pertanggungjawaban kegiatan SPP dari UPK Kecamatan Cerme.

### **2. Sumber Data**

Ditinjau dari sumbernya, data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari:

#### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber berupa hasil wawancara langsung dengan responden/pihak terkait. Dalam penelitian ini, sumber dari data primer diperoleh langsung dari beberapa pihak yang menjadi subyek penelitian, yaitu: Kepala UPK Kecamatan Cerme, Fasilitator Kecamatan (FK) Cerme, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDD), Ketua Kelompok Perempuan, pemanfaat/masyarakat.

#### **b. Data Sekunder**

Jenis data ini diperoleh secara tidak langsung dari narasumber yang biasanya berupa catatan, buku, dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Data sekunder dalam penelitian ini berupa Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan, *Standart Operational Procedure* (SOP) UPK Kecamatan Cerme kegiatan SPP,

laporan pertanggungjawaban UPK dalam pelaksanaan kegiatan SPP.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik tersebut dipilih karena sesuai dengan kebutuhan data dan pendekatan penelitian yang digunakan.

### Instrumen Penelitian

Mengingat pendekatan pada penelitian ini adalah kualitatif, maka instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Nasution (2005:9) mengatakan, "Peneliti adalah *"key instrument"* atau alat peneliti utama.

### Teknik Analisis Data

Sugiyono (2011:244) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara yang bersifat memberikan keterangan dan penjelasan terkait fokus penelitian, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengklasifikasikan ke dalam kategori, memilih mana yang penting dan kemudian disimpulkan. Berikut adalah tahapan teknik analisis data pada penelitian ini:

#### 1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dalam penelitian dipisahkan dan dipilah berdasarkan indikator yang digunakan, dalam penelitian ini adalah *input*, proses, *output* dan *outcome*. Data di luar indikator kemudian dibuang dengan tujuan hasil penelitian tetap berada pada fokus.

#### 2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini selain terdapat angka-angka perhitungan statistik, juga terdapat susunan kalimat yang memaparkan kinerja kegiatan SPP yang dapat

mempermudah dalam memahami fenomena yang diteliti.

#### 3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dari kegiatan analisis kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini berupa deskripsi atau gambaran suatu fenomena berdasarkan data yang ditemukan di lapangan dan dokumentasi yang mendukung penelitian.

Disamping teknik analisis data kualitatif seperti yang telah dijelaskan, juga terdapat teknik perhitungan untuk mencari ukuran ekonomi, efisiensi dan efektivitas sesuai dengan formulasi dalam teori *value for money*.

##### 1. Penilaian elemen ekonomi

Penilaian ekonomi dilakukan dengan melakukan perhitungan rasio dengan formulasi di bawah ini:

$$\text{rasio ekonomi} = \frac{\text{input}}{\text{harga input}} \times 100\%$$

Perhitungan hasil rasio ekonomi tersebut kemudian disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor : 690.900-327 tahun 1996 seperti tabel di bawah ini:

**Kriteria Penilaian Ekonomi Kinerja**

Presentase Ekonomi	Rasio	Kriteria
100%- ke atas		Sangat Ekonomis
90-100%		Ekonomis
80-90%		Cukup Ekonomis
60-80%		Kurang Ekonomis
Kurang dari 60%		Tidak Ekonomis

Sumber: Kepmendagri Nomor 690.900-327 Tahun 1996

##### 2. Penilaian Elemen Efisiensi

Penilaian pada elemen efisiensi juga sama halnya dengan ekonomi yang

dilakukan melalui perhitungan tingkat rasio terlebih dahulu. Berikut adalah formulasi untuk menghitung rasio efisiensi:

$$\text{rasio efisiensi} = \frac{\text{pengeluaran biaya}}{\text{pendapatan}} \times 100\%$$

Berikut adalah kriteria efisiensi untuk melihat hasil perhitungan rasio efisiensi:

**Kriteria Penilaian Efisiensi Kinerja**

Persentase Efisiensi	Rasio	Kriteria
100% - keatas		Tidak Efisien
90% - 100%		Kurang Efisien
80% - 90%		Cukup Efisien
60% - 80%		Efisien
Kurang dari 60%		Sangat Efisien

Sumber: Kepmendagri Nomor 690.900 327 Tahun 1996

**3. Penilaian Elemen Efektivitas**

Penilaian efektivitas dilakukan berdasarkan tingkat efektivitas yang diperoleh dari formulasi berikut ini:

$$\text{rasio efektivitas} = \frac{\text{realisasi pendapatan}}{\text{rencana pendapatan}} \times 100\%$$

Selanjutnya hasil perhitungan tersebut disesuaikan dengan kriteria efektivitas menurut Kepmendagri Nomor 600.900-327 Tahun 1996 seperti tabel di bawah ini:

**Kriteria Penilaian Efektivitas Kinerja**

Presentase Efektivitas	Rasio	Kriteria
100%- ke atas		Sangat Efektif
90-100%		Efektif
80-90%		Cukup Efektif
60-80%		Kurang Efektif
Kurang dari 60%		Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri Nomor 690.900-327 Tahun 1996

**IV. Hasil dan Pembahasan**

Kinerja merupakan suatu informasi mengenai pencapaian hasil dari sebuah aktivitas maupun kegiatan yang dilakukan oleh seseorang maupun organisasi tidak terkecuali organisasi

publik. Sama halnya dengan pendapat Mahsun (2006:25) bahwa kinerja memberikan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan.

Moehariono (2009:63) menyebutkan tiga jenis kinerja dalam sebuah organisasi, pada penelitian ini kinerja yang dianalisis termasuk kinerja operasional (*operation performance*), dimana analisis kinerja dilakukan pada penggunaan sumber daya (modal, bahan baku, teknologi, sumber daya manusia (SDM) atau tenaga kerja) dalam pengelolaan sebuah kegiatan.

Pada penelitian ini analisis dilakukan dengan menilai kinerja kegiatan SPP dari segi *input*, proses, *output* dan *outcome* yang menjadi indikator kinerja dan selanjutnya dianalisis menggunakan teori *value for money* yang di dalamnya terdapat elemen ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Hal ini sama seperti yang dijelaskan Indara Bastian (2006:335), "*Value for Money* merupakan konsep yang meliputi penilaian efisiensi, efektivitas, dan ekonomis dalam pengukuran kinerjanya." Selanjutnya berdasarkan hasil analisis tersebut digunakan untuk menyimpulkan hasil dari analisis kinerja tersebut. Konsep analisis kinerja pada penelitian ini seperti yang dijelaskan Moehariono (2009:96) bahwa analisis kinerja meliputi kegiatan menginterpretasikan atau menggunakan data dan informasi yang terkumpul untuk membuat sebuah kesimpulan mengenai kinerja atau pencapaian yang diperoleh atas kerja yang dilakukan melalui berbagai metode. Berikut adalah analisis kinerja pengelolaan kegiatan SPP di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik berdasarkan

elemen pokok dalam teori *value for money*:

#### 1) Ekonomi

Aspek ekonomi pada kegiatan SPP PNPM Mandiri Perdesaan dapat dilihat dari indikator kinerja *input*, dimana adanya pengalokasian *input* menjadi *input* primer dan *input* sekunder. Mahmudi (2005:89) mengatakan bahwa elemen ekonomi terkait dengan penggunaan biaya atau anggaran untuk mengkonversikan *input* menjadi *input* primer dan *input* sekunder. *Input* primer dalam pengelolaan kegiatan SPP di Kecamatan Cerme adalah sumber daya keuangan atau alokasi dana dari BLM yang digunakan untuk modal kegiatan SPP. Sedangkan *input* sekunder berupa tenaga kerja, bahan, infrastruktur dan perlengkapan yang digunakan untuk operasional kegiatan.

Tahun 2012, anggaran BLM sebesar Rp 800.000.000; dialokasikan untuk kegiatan SPP sebesar 25% atau Rp 200.000.000;. Dana tersebut kemudian dipotong 5% untuk biaya operasional, jadi modal bersih untuk SPP BLM sebesar Rp 190.000.000;. Sumber modal dana yang digunakan untuk SPP Perguliran di tahun 2012 sebesar Rp 2.369.000.000;. Jadi, total *input* primer atau dana untuk modal kegiatan SPP di Kecamatan Cerme sebesar Rp 2.559.000.000;.

Analisis kinerja dari aspek ekonomi dilakukan hanya pada *input* sekunder sedangkan untuk *input* primer tidak perlu dilakukan. Hal tersebut dikarenakan dalam kegiatan SPP *input* primer sebagai modal kegiatan tidak perlu dikelola lagi sehingga dapat langsung disalurkan kepada pemanfaat. Alokasi dana yang dikonversi UPK Cerme untuk memperoleh *input*

sekunder berasal dari alokasi biaya operasional 2% dana BLM untuk kegiatan SPP yaitu sebesar Rp 4.000.000; dan dari pendapatan jasa yang diperoleh sebesar Rp 70.000.000;. Jadi total untuk biaya operasional yang dikonversikan untuk memperoleh *input* sekunder adalah Rp. 74.000.000;. Berdasarkan uraian di atas, diperoleh perhitungan rasio ekonomi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{rasio ekonomi} &= \frac{\text{input}}{\text{harga input}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } 74.000.000}{\text{Rp } 64.288.641} \times 100\% = 115,10\% \end{aligned}$$

Bila dianalisis dari aspek ekonomi, kinerja pengelolaan kegiatan SPP termasuk dalam kategori sangat ekonomis dengan angka mencapai 115,10%. Perolehan penilaian kinerja sangat ekonomis pada kegiatan SPP Kecamatan Cerme menunjukkan bahwa penggunaan dana alokasi biaya operasional dipergunakan dengan baik dalam mengkonversikan dana menjadi *input* sekunder.

Konversi *input* yang dilakukan untuk memperoleh *input* sekunder, dalam kegiatan SPP PNPM Mandiri Perdesaan meliputi: honor pengurus, administrasi dan umum, transport, biaya penyusutan, biaya dibayar di muka dan lain-lain. Honor pengurus yang dikeluarkan setiap tahunnya sebesar Rp 33.777.000; yang digunakan untuk membiayai tiga pengurus UPK, untuk administrasi (pembelian ATK) dan umum sebesar Rp. 8.713.100;,, biaya transport Rp 13.310.000;,, biaya dibayar di muka sebesar Rp 2.833.333;,, untuk biaya penyusutan Rp 3.700.208 dan untuk biaya lain-lain sebesar Rp 1.955.000;.

## 2) Efisiensi

Mahmudi (2005:91) mengatakan bahwa efisiensi akan diperoleh suatu organisasi, program maupun kegiatan apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah mungkin atau sebaliknya yaitu dengan *input* tertentu dapat menghasilkan *output* sebesar mungkin (*spending well*).

Untuk melihat kinerja berdasarkan tingkat efisiensi, maka dapat digunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{rasio efisiensi} &= \frac{\text{pengeluaran biaya}}{\text{pendapatan}} \times 100\% \\ &= \frac{70.432.537}{450.749.010} \times 100\% = 15,63\% \end{aligned}$$

Kinerja kegiatan SPP di Kecamatan Cerme dinilai sangat efisien berdasarkan perhitungan di atas. Perhitungan rasio efisiensi menyebutkan bahwa rasio biaya pada kegiatan SPP adalah 15.63% atau sebesar Rp 70.432.537; atas total pendapatan yang diperoleh yaitu sebesar Rp 450.749.010;. Keberadaan kinerja kegiatan SPP pada rasio efisiensi diangka 15.63% menunjukkan bahwa UPK dalam mengelola kegiatan SPP menekankan efisiensi biaya sehingga kegiatan berjalan dengan lancar tanpa adanya pemborosan.

Efisiensi juga diperoleh atas penggunaan *surplus* untuk operasional kegiatan SPP. Di tahun 2012, UPK Kecamatan Cerme memperoleh *surplus* dari pengelolaan SPP sebesar Rp 435.348.500;. Dari total *surplus* tersebut, UPK Kecamatan Cerme merencanakan alokasi laba di tahun 2012 untuk pemupukan modal sebesar Rp 317.804.405; atau 73% dari total *surplus* yang diterima. Alokasi pemupukan modal tersebutlah yang dijadikan modal untuk kegiatan SPP Perguliran. Penilaian efisiensi selain

dilihat dari penggunaan dana untuk biaya pendapatan juga harus memiliki standar efisiensi, seperti yang dikatakan oleh I Gusti Agung Rai (2008:22) bahwa efisiensi meliputi *input*, *output*, dan standar efisiensi. Standar efisiensi yang digunakan dalam menilai efisiensi pengelolaan kegiatan SPP adalah pemanfaatan utilitas. Yang meliputi: efisiensi karyawan, peralatan, fasilitas dan lainnya.

### a. Efisiensi Karyawan

Kegiatan SPP dilaksanakan oleh pihak UPK yang terdiri dari tiga pengurus, yaitu ketua, bendahara dan sekretaris. Pada kegiatan SPP sering kali terjadi *overlapping* dikarenakan UPK Cerme tidak hanya menangani kegiatan SPP, tetapi juga menangani dua kegiatan non SPP lainnya yang juga dibiayai oleh dana BLM. Hal tersebut menunjukkan bahwa penilaian kinerja dengan kriteria sangat efisien dilakukan dengan optimalisasi jumlah karyawan yang ada tanpa menambah tenaga baru untuk mengelola kegiatan SPP serta adanya koordinasi antar pelaku/lembaga pengelola kegiatan di Kecamatan Cerme termasuk yang ada di desa.

### b. Efisiensi Peralatan:

Tidak hanya dari segi tenaga kerja tetapi juga dalam hal peralatan yang menunjang kegiatan juga membuat kinerja pengelolaan kegiatan SPP Kecamatan Cerme dinilai sangat efisien. Kegiatan SPP adalah satu dari tiga rangkaian kegiatan yang dibiayai dana BLM. Hal tersebut menyebabkan peralatan yang digunakan telah tersedia tanpa dianggarkan biaya tambahan untuk peralatan. Peralatan yang digunakan dalam kegiatan SPP meliputi: unit komputer, mesin printer, dan papan pengumuman.

### c. Efisiensi Fasilitas Lainnya

yang menunjang pengelolaan kegiatan SPP di Kecamatan Cerme meliputi prasarana dan sarana. Prasarana yang dimaksud adalah bangunan untuk perkantoran yang dipergunakan sebagai tempat transaksi kegiatan SPP. Bangunan yang digunakan untuk perkantoran kepemilikannya bukan atas nama UPK Kecamatan Cerme tetapi hanya menggunakan sistem sewa bangunan untuk perkantoran UPK Cerme. Sarana disini bukanlah penyediaan kendaraan transportasi, tetapi hanya biaya transportasi untuk membeli bahan bakar selama diperlukan untuk proses kegiatan. Untuk biaya transportasi sudah termasuk dalam biaya operasional yang telah dianggarkan sebelumnya. Jadi dari segi efisiensi, pengelolaan kegiatan SPP di Kecamatan Cerme layak dikatakan sangat efisien dengan hasil penilaian dari beberapa indikator yang telah dilakukan.

### 3. Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. I Gusti Agung Rai (2008:23) mengartikan efektivitas adalah sesuatu yang mengacu pada hubungan antara *output* dengan tujuan yang ditetapkan atau dapat dikatakan efektivitas merupakan hubungan antara *outcome* dan *output*. Efektivitas pada kegiatan SPP dapat diperoleh dari realisasi dan rencana pendapatan kegiatan. Realisasi dan rencana pendapatan dari jasa pengembalian pinjaman SPP dapat diperoleh pada Laporan Operasional UPK Tahun Anggaran 2012. Berdasarkan laporan tersebut, penilaian efektivitas diperoleh dengan perhitungan di bawah ini:

**rasio efektivitas =**

$$\frac{\text{realisasi pendapatan}}{\text{rencana pendapatan}} \times 100\%$$

$$= \frac{435.348.500}{304.333.450} \times 100\% = 143,05\%$$

Perhitungan pada rasio efektivitas di atas mencapai angka 143,05% dan dapat diartikan bahwa kinerja pada kegiatan SPP di Kecamatan Cerme dapat dikatakan sudah sangat efektif, sesuai dengan kriteria penilaian efektivitas. Perolehan tersebut dikarenakan pencapaian tingkat pengembalian pinjaman 100%. Berdasarkan pernyataan dalam wawancara di lapangan mengindikasikan beberapa faktor pendukung efektivitas, seperti: adanya suprastruktur atau peraturan selama kegiatan berlangsung, kedisiplinan pemanfaat dalam angsuran pengembalian dana, komitmen para pelaku kegiatan SPP di Kecamatan Cerme termasuk di jajaran desa serta efektivitas dalam pengalokasian dana *surplus* sesuai dengan ketentuan.

a. Suprastruktur atau Peraturan  
 Pengelolaan kegiatan SPP memiliki beberapa aturan yang mengikat berjalannya proses kegiatan. Secara umum, Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan sedikit memberi penjelasan mengenai kegiatan SPP. Selanjutnya, peraturan tersebut diperjelas melalui Penjelasan IV Petunjuk Teknis Operasioanal (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan mengenai Jenis dan Proses Kegiatan. Penjelasan tersebut cukup rinci memberi ketentuan-ketentuan dalam kegiatan SPP seperti: sasaran kegiatan dan mekanisme pengelolaan kegiatan. Kedua aturan tersebut yang digunakan UPK Kecamatan Cerme dalam menyusun *Standart Operational Procedure* (SOP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK).



b. Sikap Pelaku Kegiatan SPP di Kecamatan Cerme

Selain adanya peraturan yang mengendalikan pengelolaan kegiatan SPP di Kecamatan Cerme, sikap pelaku kegiatan SPP di Kecamatan Cerme sangat membantu dalam mencapai efektivitas kinerja kegiatan SPP. Misalnya UPK, meskipun sudah ada peraturan dan perjanjian mengenai jatuh tempo pembayaran dan denda pihak UPK tetap turun ke desa-desa bila sampai dua hari terakhir belum ada indikasi pembayaran. Sejalan dengan UPK, KPMD dan pengurus kelompok yang ada di desa juga selalu memberi pembinaan mengenai pembayaran angsuran pengembalian dana pinjaman.

c. Kedisiplinan Pemanfaat dalam Angsuran Pengembalian Dana

Sikap para pelaku dalam kegiatan SPP di Kecamatan Cerme nampaknya cukup efektif bagi kedisiplinan pemanfaat untuk membayar angsuran pengembalian. Hasil di lapangan menunjukkan bahwa para pemanfaat cukup disiplin dalam membayar yang disebabkan selain dari imbauan yang dilakukan pengurus juga karena mereka masih merasa membutuhkan bantuan dana tersebut untuk mengembangkan usahanya sehingga mereka takut bila terlambat akan dijadikan bahan pertimbangan dalam usulan pemanfaat tahun berikutnya.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Analisis kinerja pada kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik berdasarkan teori *value for money* dapat dikatakan sangat ekonomis, sangat efisien dan sangat efektif. Hal ini didasarkan pada hasil penilaian kinerja

pada indikator *input*, proses, *output*, dan *outcome* yang turut membentuk penilaian terhadap elemen pokok teori *value for money* melalui perhitungan rasio ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

Dari aspek ekonomi, kinerja keuangan dalam pengelolaan kegiatan SPP termasuk dalam kategori sangat ekonomis dengan angka rasio ekonomi mencapai 115,10%. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan dana alokasi dipergunakan dengan baik dalam mengonversikan *input* menjadi *input* sekunder. Biaya operasional untuk memperoleh *input* sekunder adalah Rp. 74.000.000; sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk operasional sebesar Rp 64.288.641;. Konversi *input* sekunder dilakukan untuk membiayai honor pengurus sebesar Rp 33.777.000;; untuk administrasi (pembelian ATK) dan umum sebesar Rp. 8.713.100;; biaya transport Rp 13.310.000;; biaya dibayar di muka sebesar Rp 2.833.333;; untuk biaya penyusutan Rp 3.700.208 dan untuk biaya lain-lain sebesar Rp 1.955.000;.

Dari aspek efisiensi, kinerja pengelolaan kegiatan SPP Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dinilai sangat efisien. Hal tersebut berdasarkan perhitungan rasio efisiensi berdasarkan laporan operasional kegiatan SPP di Kecamatan Cerme. Perhitungan tersebut menghasilkan angka 15.63% terkait rasio efisiensi yang berasal dari perbandingan antara total biaya pengeluaran sebesar Rp 70.432.537; atas total pendapatan yang diperoleh yaitu sebesar Rp 450.749.010;. Keberadaan kinerja kegiatan SPP pada rasio efisiensi diangka 15.63% menunjukkan bahwa UPK dalam

mengelola kegiatan SPP menekankan efisiensi biaya sehingga kegiatan berjalan dengan lancar dan dapat meningkatkan *surplus* yang diperoleh UPK Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Selain itu, efisiensi juga dapat dilihat dari pemanfaatan utilitas dimana efisiensi dilakukan pada aspek karyawan, peralatan dan fasilitas pendukung kegiatan SPP.

Kinerja pengelolaan kegiatan SPP di Kecamatan Cerme dapat dikatakan sangat efektif berdasarkan perhitungan rasio efektivitas pengelolaan kegiatan SPP yang mencapai 143,05%. Pencapaian hasil kinerja pengelolaan SPP di Kecamatan Cerme dilihat dari pendapatan yang diperoleh atas pencapaian tingkat pengembalian pinjaman 100%. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan mengindikasikan beberapa faktor pendukung, seperti: adanya suprastruktur atau peraturan selama kegiatan berlangsung, komitmen para pelaku kegiatan SPP di Kecamatan Cerme, dan kedisiplinan pemanfaat dalam angsuran pengembalian dana. Faktor-faktor tersebutlah yang mewujudkan kinerja dalam kategorisasi sangat efektif pada kegiatan SPP di Kecamatan Cerme.

Berdasarkan hasil analisis kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa kegiatan SPP di Kecamatan Cerme kabupaten Gresik sangat layak untuk dilaksanakan kembali setiap tahunnya sebagai kegiatan di PNPM Mandiri Perdesaan disamping dua kegiatan lainnya yang diajukan di setiap desa.

### **Saran**

Berikut beberapa masukan yang disarankan dalam pengelolaan kegiatan SPP Kecamatan Cerme:

1. Terkait tenaga kerja dalam pengelolaan kegiatan SPP yaitu penambahan tenaga kerja untuk mengelola kegiatan SPP agar tidak terjadi *over-lapping* khususnya dalam struktur jabatan UPK Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Hal tersebut disarankan agar kinerja kegiatan SPP lebih optimal dikarenakan ada dua kegiatan lainnya yang juga ditangani oleh pihak UPK Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.
2. Adanya penambahan jumlah nominal yang dipinjamkan kepada pemanfaat agar dapat digunakan sebagai modal untuk mengembangkan usaha pemanfaat menjadi lebih besar lagi. Hal tersebut seperti yang diharapkan pemanfaat dan penjelasan dari ketua kelompok perempuan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agung Rai, I Gusti. 2008. *Audit Kinerja pada Sektor Publik: Konsep, Praktik dan Studi kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2008. *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2012. *Jumlah dan Presentase Menurut Provinsi 2012*. (Online). (<http://bps.go.id>, diakses 16 Januari 2013),
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2012. *Profil Kemiskinan di Jawa Timur 2012*. (Online). (<http://jatim.bps.go.id>, diakses 16 Januari 2013).
- Creswell, John W. 2012. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dharma, Surya. 2005. *Manajemen Kinerja: Falsafah Teori dan Penerapannya*. Yogyakarta: P4TK Seni dan Budaya Yogyakarta.
- Direktorat Jenderal Anggaran. 2005. *Manajemen Kinerja: Menuju Keunggulan Organisasi Berkinerja Tinggi*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2005. Penjelasan IV tentang Jenis dan Proses Pelaksanaan Kegiatan-Kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Jakarta: Tim Koordinasi Program Pengembangan Kecamatan.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang *Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*. 1996. Jakarta.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mahsun, Mohammad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPF.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Moeheriono. 2009. *Pengukuran Kinerja Berbasis kompetensi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: Gramedia.
- Nasution, S. 2005. *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito Agung.
- PNPM Mandiri Jawa Timur. 2012. *Profil PNPM Mandiri Perdesaan*. (Online). ([http://www.pnpm\\_mandiri.org/16\\_JawaTimur.pdf](http://www.pnpm_mandiri.org/16_JawaTimur.pdf); diakses 16 Januari 2012).
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Ulum, Ihyaul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik: Sebuah Pengantar*. Malang: UMM Press.
- Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Press.
- Widodo, Joko. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Zuriah, Nurul. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.